

## PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONTEKS BUDAYA

Fathurrohman Baidlowi  
INISA Tambun-Bekasi  
inisa\_tambunbekasi@yahoo.com

### **Abstrak**

Keberhasilan dari segi kebudayaan dan peradaban merupakan harapan suatu bangsa. Pada realitasnya ada suatu negara yang berhasil membangun kebudayaan, namun gagal dalam membangun peradaban, sebaliknya ada juga yang berhasil dalam membangun peradaban namun gagal total dalam membangun kebudayaan. Pendidikan Islam hadir untuk membangun dua kekuatan itu, baik dari segi kebudayaan maupun peradaban. Membangun suatu kebudayaan berarti pembangunan dari sudut batiniyah apapun bentuknya, sedangkan membangun peradaban berarti pembangunan dari sudut lahiriyah. Baik lahiriyah maupun batiniyah keduanya harus berkelindan, sehingga membentuk manusia seutuhnya dan menjadi pemimpin di bumi (*khalifah fil ard*) benar-benar terwujud, sehingga menjadi Negara yang ideal *baladatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*.

**Kata Kunci :** *Pendidikan; Islam; Konteks Budaya*

## **A. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Pembentukan manusia yang demikian itu secara signifikan mengharuskan adanya mata pelajaran agama, karena inti ajaran agama adalah pembentukan akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan yang baik dengan Allah, manusia dan alam semesta. Namun dalam praktiknya, mata pelajaran agama dan budi pekerti/akhlak mulia dalam hal ini adalah budaya (*culture*) tidak menjadi salah satu mata pelajaran yang menentukan kelulusan dalam ujian nasional. Dalam kaitan ini, pelaksanaan pendidikan tampaknya kurang sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Artikel ini pun mengamati bahwa di samping ketidak sejalan tersebut, juga pendidikan agama harus diakui bahwa hingga saat ini, mutu pendidikan Islam masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mutu pendidikan secara umum. Ini terjadi antara lain, karena pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh pelbagai pendidikan Islam, belum dilakukan secara terencana dan terkonsep, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, kualifikasi guru, kriteria calon siswa, mutu lulusan, standar sarana prasarana, biaya, lingkungan, dan evaluasi tidak dirumuskan berdasarkan sebuah teori yang matang.

Di sisi lain, pendidikan Islam sendiri belum mampu mengintegrasikan disiplin ilmunya dengan konteks filsafat, dan kebudayaan. Untuk itu artikel ini mencoba melakukan implementasi pendidikan Islam dalam konteks budaya, diawali dengan definisi dari kebudayaan kemudian dipaparkan tentang hubungan Kebudayaan dengan Pendidikan sebagai wujud implementasi Pendidikan Islam dalam konteks Budaya.

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980); lihat pula Abuddin Nata, *Akhlak/Tasawuf* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23-24.

## **B. Pengertian budaya atau Kebudayaan**

Secara bahasa, budaya berasal dari bahasa Sansekerta Budhayah. Kata ini berasal dari dua kata yaitu budi dan daya. Budi artinya : akal, tabiat, watak, akhlak, perangai, kebaikan, daya upaya, kecerdikan untuk pemecahan masalah. Sedangkan daya : berarti kekuatan, tenaga, pengaruh, jalan, cara, muslihat. Dalam bahasa Arab, kata yang dipakai untuk kebudayaan adalah : *al-Hadlarah*, *as-Tsaqafiyah* atau *Tsaaqafah* yang artinya juga peradaban. Kata lain yang digunakan untuk menunjuk kata kebudayaan adalah : *Culture* (Inggris), *Kultuur* (Jerman), *Cultuur* (Belanda).

Kajian tentang kebudayaan sering disamakan atau disandingkan dengan peradaban. Kedua istilah ini memiliki kesamaan dan perbedaan arti. Secara istilah, banyak pengertian tentang kebudayaan diantaranya :

- 1) Kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam keseluruhan segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan waktu.
- 2) Aspek ekspresi simbolik perilaku manusia atau makna bersama yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari sehingga menjadi konsensus dan karenanya mengabaikan konflik.
- 3) Kondisi kehidupan biasa yang melebihi dari yang diperlukan.
- 4) Bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, struktur intuitif yang mengandung nilai-nilai rohaniah tinggi yang menggerakkan masyarakat atau hasanah historis yang terefleksikan dalam nilai yang menggariskan bagi kehidupan suatu tujuan ideal dan makna rohaniyah yang jauh dari kontradiksi ruang dan waktu.

Istilah yang hampir sama dengan kebudayaan adalah peradaban. Secara bahasa, peradaban berasal dari kata Arab yakni *adab* yang berarti etika, sopan santun, terdidik. Disamping itu juga berasal dari kata *Civilization* yang berakar dari *civic* yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga Negara. Oleh karena itu Civilisasi menjadikan seseorang warga negara hidup lebih baik, teratur, tertib, sopan dan maju. Ciri-ciri masyarakat semacam ini adalah masyarakat yang beradab, beretika dan berakhlak (mulia). Arti yang sepadan dengan peradaban dalam bahasa Arab adalah *Madaniyah* (kota) dan *Tsaqafiyah* (kehalusan budi pekerti).

Secara istilah, peradaban adalah hasanah pengetahuan terapan yang dimaksudkan untuk mengangkat dan meninggikan manusia dari peringatan penyerahan diri terhadap kondisi alam sekitar. Peradaban merupakan ikhtisar perkembangan yang diraih tenaga intelektual manusia, dan sejauh mana kemampuan itu dalam mengendalikan tabiat sesuatu. Peradaban meliputi semua pengalaman praktis yang diwarisi dari satu generasi kegenerasi. Peradaban juga berarti gejala yang dibuat dan bersifat material, apa yang kita pergunakan sehingga ia dapat disebut sebagai pranata-pranata sosial.

Perbedaan istilah antara kebudayaan (*culture*) dengan peradaban (*civilization*) jalan yang terbaik menurut Nourouzzaman Shiddiqie ialah mengambil pilihan yang tepat guna memudahkan kita memahami kebudayaan selanjutnya. Jika kita memahami pendapat Wensink yaitu *culture* = kebudayaan dan *civilization* = peradaban.

Maka kebudayaan adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Sedangkan peradaban ialah suatu aktifitas lahir walaupun keduanya sangat erat hubungannya namun pengertiannya tetap berbeda.

Seorang yang beradab belum tentu berbudaya. Kemajuan dalam bidang materi tidak mesti bersesuaian dengan perkembangan akal. Sebaliknya manusia yang berbudaya belum tentu sungguh-sungguh berperadaban. Sebagai contoh, Austria tinggi dalam kebudayaan namun tidak dalam peradaban, sedangkan Amerika tinggi dalam peradaban namun tidak dalam kebudayaan.

### **C. Kebudayaan Islam sebagai cikal bakal Pendidikan Islam**

Sebagai budaya yang muncul di tanah Arab, maka muncul pertanyaan : Kebudayaan Islam atau Kebudayaan Arab? Dari hal seperti ini muncul dua pendapat.

**Pendapat Pertama**, mengatakan bahwa kebudayaan ini lebih tepat disebut sebagai kebudayaan Arab karena kebudayaan ini lahir di tanah Arab sehingga disebut juga kebudayaan padang pasir. Dalam perkembangannya masyarakat Arab dengan bahasa Arabnya memiliki peran sangat strategis dalam penyebarannya. Disamping itu, terdapat sifat-sifat rahaniah khusus yang biasa didapatkan pada bangsa Arab.

Abdul Muin Majid menyimpulkan, bahwa tidak mudah mengetahui dasar-dasar kebudayaan Islam, karena kebudayaan tersebut seperti halnya kebudayaan yang lain tidak muncul begitu saja. Tetapi ada proses pendahulunya yaitu munculnya kebudayaan-kebudayaan lain yang mendahuluinya. Kebudayaan Islam merupakan perpaduan antara kebudayaan lama dan baru. Antara kebudayaan kadang saling menopang, menutupi bahkan mengubah.

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa dasar kebudayaan Islam adalah orang Arab kemudian kawasan lain yang ditaklukkan oleh orang Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Chaldun, bahwa “ Bangsa Arab tidaklah mampu mendirikan suatu kerajaan melainkan atas dasar agama, seperti wahyu seorang Nabi, atau ajaran seorang waliyullah”.

**Pendapat kedua**, lebih memaknai sebagai kebudayaan Islam. Karena meskipun kebudayaan ini lahir di Arab, akan tetapi dalam perkembangannya Islam adalah agama yang dominan dalam kebudayaan ini dan syariah Islam adalah pengikat satu-satunya bagi bangsa-bangsa di dunia Islam, baik di Asia, Afrika, maupun Eropa.

Dengan demikian penyebutan kebudayaan ini sebagai kebudayaan Islam di atas landasan bahwa Islamlah yang menaungi kebudayaan ini dan membekalinya dengan visi historisnya dari kulturalnya, dan memberi bentuk intuitifnya secara khusus.

Jadi kebudayaan Islam adalah hasil cipta, karsa dan rasa bersama dari orang-orang yang berada diwilayah kekuasaan pemerintahan Islam tanpa peduli asal bangsa, agama dan sebagainya. Pendapat lain yaitu setiap produk kecerdasan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi produk-produk dari non muslim yang berada dan bekerja diwilayah kekuasaan non muslim juga dinamakan kebudayaan Islam.

Ada pendapat lain, bahwa kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang mencerminkan perintah agama Islam, seperti perintah menutup aurat, khususnya bagi wanita adalah khas kebudayaan Islam. Dalam hal ini ada pertanyaan, (1) Apakah wahyu Tuhan termasuk kategori kebudayaan, (2) apakah mode pakaian muslimah diseluruh dunia Islam itu sama? Jelas tidak dan mode pakaian itu lebih cenderung dimasukkan dalam kategori peradaban daripada kebudayaan.

Di sinilah pentingnya artikel ini untuk menyatukan pemahaman atas budaya atau kebudayaan sebagai cikal bakal atas sebuah proses yang kemudian kita bersama-sama untuk mencari konsep baru tentang pendidikan Islam ditengah-tengah konteks beragamanya budaya di Indonesia.

#### **D. Hubungan Kebudayaan dengan Pendidikan sebagai wujud integrasi Pendidikan Islam dalam konteks Budaya**

Perkembangan kebudayaan merupakan bagian dari persoalan yang harus diketahui dan diantisipasi serta dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan, perancang dan praktisi pendidikan. Visi, misi, arah tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidikan dan tenaga kependidikan, kualitas lulusan, pengelolaan, sarana prasarana, keuangan, lingkungan, dan evaluasi pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan harus mempertimbangkan faktor kebudayaan. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Pendidikan Islam harus siap untuk bersimbiosis dengan konteks kebudayaan antara lain :

##### **1) Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan berorientasikan pada konteks budaya**

Visi pendidikan dengan pendekatan kebudayaan dapat dirumuskan antara lain menjadikan pendidikan sebagai pranata yang kuat dan berwibawa dalam memelihara, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Sedangkan misi pendidikan yang berbasis kebudayaan antara lain :

- a) Mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia kedalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan.
- b) Menjadikan pendidikan sebagai wahana bagi permasyarakatan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
- c) Mengupayakan terhindarnya peserta didik dari pengaruh budaya global yang negatif.
- d) Mendorong tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang mendorong lahirnya etos kerja yang tinggi.

Adapun tujuan pendidikan yang berbasis kebudayaan adalah melahirkan peserta didik yang memiliki karakter yang merupakan keseluruhan dinamikan rasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka.

Secara singkat, tujuan pendidikan karakter adalah sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat tumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain dalam dunia. Pendidikan karakter bertujuan membentuk pribadi menjadi insan yang berkeutamaan.<sup>2</sup>

## **2) Layanan dan Kemasan Pendidikan budaya kota berbasis makna spiritual**

Layanan dan kemasan pendidikan modern dalam menghadapi dampak budaya kota antara lain dengan cara mengajak siswa, orang tua, dan sesama pendidik bersama-sama mengadakan refleksi atau perenungan secara mendalam atau secara berkala. Pendidikan patut membuat hal ini menjadi hal yang dinikmati. Tantangan terbesar tentunya adalah bagaimana agar pilihan-pilihan, pengajaran-pengajaran dan pembelajaran-pembelajaran yang menjadi keniscayaan pada budaya kota mendapatkan makna secara spiritual.

Selain itu, tantangan pelayanan pendidikan di perkotaan adalah bagaimana menyiapkan para siswa untuk mampu menyadari, memahami, dan mengambil pilihan-pilihan secara mandiri. Kemandirian ini menjadi figur yang harus dicapai oleh siswa-siswa sebelum mereka memasuki masa dewasa.

Pertanyaan yang besar ialah, apakah pendidikan modern siap untuk melayani mereka untuk mendapatkan fitur serupa itu ? Apakah kurikulum yang ada dan suasana atau iklim pendidikan yang ada memungkinkan siswa bertumbuh menjadi siswa yang mandiri dalam melakukan pilihannya ? Semua pertanyaan tersebut harus dijawab oleh dunia pendidikan.

## **3) Muatan Pendidikan berbasis pada nilai luhur kepribadian Indonesia**

Kebudayaan Indonesia yang dicita-citakan ialah satu kebudayaan yang tetap mencerminkan kepribadian Indonesia dan mampu meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia harus tegar menatap tantangan kekinian serta mampu bersaing dengan kebudayaan luar, bahkan dapat memberikan sumbangan bagi pembinaan kebudayaan universal.

---

<sup>2</sup> Doni Koesoema A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di zaman Global*, cet. ke-1 (Jakarta : Grasindo, 2007), 3-4.

Apa yang dimaksud dengan manusia dan juga masyarakat yang berkualitas ialah manusia yang bertakwa, tidak bodoh, tidak miskin dan tidak terbelakang serta memiliki semangat juang dan membangun hari esok yang lebih baik, memiliki rasa solidaritas sosial yang tinggi. Salah satu tantangan kekinian ialah modernisasi dan pendukungnya yang bercirikan : aktif, dinamis, efisinsi, disiplin, rasional, terbuka terhadap penemuan-penemuan ilmiah, memberikan penghargaan kepada prestasi bukan kepada status dan berorientasi ke masa depan.

Alat pendukung peningkatan kualitas dan kemampuan menghadapi tantangan-tantangan adalah pendidikan, termasuk pendidikan agama Islam. Permasalahan yang timbul ialah bagaimana memberikan pendidikan agama, agar agama yang diamalkan itu mampu menggerakkannya untuk mengubah nasib guna memperoleh kesejahteraan hidup di dunia. Bahkan berusaha memperbaiki nasib adalah salah satu perintah agama juga.

Agama tidak menyuruh umatnya bersikap fatalistik karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan dalam arti harfiah, karena itu segala perbuatan hanya bisa datang dari langit. Etos kerja harus dibangkitkan dan untuk mencapai tujuan itu, sikap percaya pada takhayul dan tradisi-tradisi mistik yang tidak rasional mereka-reka angka dengan atau tanpa bantuan dukun harus dijaui.

Muatan pendidikan agama harus mampu membangkitkan semangat untuk hidup dan tidak mudah putus asa. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan agama tidak hanya ditekankan pada sisi kognitif kecuali terhadap orang yang melakukan studi tentang agama, tetapi harus lebih banyak pada sisi efektifnya. Dengan demikian, masalah-masalah kebersihan, kesehatan, memelihara lingkungan hidup, menggelorakan semangat solidaritas sosial tidak hanya sekedar diketahui bahwa hal itu diperintahkan oleh agama, tetapi juga dihayati dan diamalkan.

Dengan kata lain, muatan pendidikan, termasuk pendidikan agama harus mampu meletakkan landasan moral, etika, dan spiritual yang kukuh bagi pembangunan Indonesia. Ringkasnya, pendidikan agama harus menjadi pendorong lahirnya kebudayaan yang berkualitas, jangan sampai agama dipahami secara sempit, yang melepaskan dunia dari keterkaitannya dengan akhirat dan menjadi penghambat kearah itu.<sup>3</sup>

Tidak hanya itu, muatan pendidikan juga harus mampu memperkenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia, baik sebagai pengetahuan, maupun sebagai alat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dan lainnya serta membangkitkan rasa cinta tanah air. Muatan pendidikan ini selanjutnya dituangkan dalam muatan kurikulum lokal (*kurkol*). Pendidikan yang demikian itu kemudian mengarah kepada terlaksananya konsep pendidikan multikultural, yang pada hakikatnya adalah sebuah apresiasi terhadap keanekaragaman budaya yang berkembang di Indonesia, dan menggunakannya sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu dan lainnya.

Muatan pendidikan yang berbasis pada karakter juga erat kaitannya dengan fitrah atau potensi dasar manusia, yaitu sebagai makhluk yang menyukai kebaikan, keindahan dan kebenaran. Kesukaan pada kebaikan akan melahirkan etika dan agama (budaya), kesukaan pada keindahan akan melahirkan estetika dan seni, sedangkan kesukaan kepada kebenaran akan melahirkan pengetahuan. Perpaduan antara etika (moral), estetika (seni), dan pengetahuan itulah yang akan membawa kemajuan suatu bangsa secara seimbang.<sup>4</sup>

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka tidaklah mengherankan jika pengembangan moral pada zaman Yunani ditempa melalui pengajaran musik, khususnya, kita ingat sumbangan bagi pembentukan karakter moral anak didik. Belajar memetik harpa, membaca syair-syair puisi terkenal diiringi dengan dentingnya gitar yang sifatnya ritmis dan harmonis mampu menembus secara mendalam jiwa anak-anak muda dan membuatnya lebih lembut, membuat mereka mampu menemukan keseimbangan dan harmoni interior di dalam jiwanya.

---

<sup>3</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. ke-1 (Yogtakarta :Pustaka Pelajar, 1987), 259-260.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 2003), 80.

Hal ini sejalan dengan pendapat Protagora yang mengatakan bahwa seluruh hidup manusia memerlukan keseimbangan dan harmoni.<sup>5</sup> Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang banyak dipengaruhi budaya global yang cenderung rasionalistik, pragmatis, hedonistik, dan sekularistik, tampak muatan pendidikan yang memberikan keseimbangan pada sentuhan kejiwaan, seni, dan budi pekerti kurang mendapatkan perhatian yang semestinya.

Mata pelajaran tentang kesenian, sastra dan budi pekerti mulia, misalnya, tidak menjadi prioritas utama.<sup>6</sup> Materi pelajaran dan ujian sekolah dan ujian yang diselenggarakan oleh negara misalnya, cenderung menitikberatkan pada bidang ilmu-ilmu rasional dan empiristik. Akibatnya kepribadian siswa menjadi tidak utuh, kurang memiliki kelembutan dan kehalusan jiwa. Pendidikan yang dilaksanakan sekarang tampaknya sudah bergeser dari visi kultural kepada visi rasionalistik, pragmatis, hedonistik, dan materialistik. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari adanya pengaruh penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in cultural*).<sup>7</sup>

Penjajahan baru dalam bidang kebudayaan yang berpengaruh ke dalam dunia pendidikan tersebut yang terjadi di zaman sekarang ini, pernah terjadi pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Belanda dengan misi utamanya tiga G, yaitu *Gold*, *Gospel* dan *Glorious* telah mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Dengan misi globalnya Belanda berusaha menguras kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan negerinya.

---

<sup>5</sup> Doni Koessoema A, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak Zaman Global*, cet. ke-1 (Jakarta : Grasindo, 2007), 3-4.

<sup>6</sup> Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Pembentukan manusia yang demikian itu secara signifikan mengharuskan adanya mata pelajaran agama, karena inti ajaran agama adalah pembentukan akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan yang baik dengan Allah, manusia dan alam semesta. Namun dalam praktiknya, mata pelajaran agama dan budi pekerti/akhlak mulia tidak menjadi salah satu mata pelajaran yang menentukan kelulusan dalam ujian nasional. Dalam kaitan ini, pelaksanaan pendidikan tampaknya kurang sejalan dengan tujuan undang-undang tersebut. Fazlur Rahman, *Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1980); lihat pula Abuddin Nata, *Akhlaq/Tasawuf* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23-24.

<sup>7</sup> Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatif* (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 2001), 23-24.

Sedangkan dengan misinya gospelnya, Belanda berusaha ikut mendukung tersebar dan tersiarnya Kristenisasi di Indonesia dengan jalan memberikan bantuan kemudahan, dana, dan fasilitas lainnya untuk membangun gereja dan kegiatan keagamaannya. Selanjutnya dengan misi gloriousnya, Belanda berusaha menjadikan Indonesia sebagai jajahannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan analisis terhadap sifat dan karakter pendidikan Belanda yang demikian itu, maka Ki Hajar Dewontoro memberikan penguatan terhadap pendidikan yang berbasis kebudayaan. Hal ini terlihat dalam Rencana Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan pada zaman persiapan kemerdekaan sebagai berikut :

- 1) Dengan “undang-undang kewajiban belajar” atau peraturan lain jika keadaan di suatu daerah memaksanya, pemerintah memelihara pendidikan kecerdasan, akal budi untuk segenap rakyat dengan cukup dan sebaik-baiknya.
- 2) Dalam garis-garis besar pendidikan ada perikemanusiaan, seperti terkandung dalam segala pengajaran agama, maka pendidikan dan pengajaran bersendi agama dan kebudayaan bangsa, serta menuju ke arah ‘keselamatan’ dan “kebahagiaan” masyarakat.

---

<sup>8</sup> Seperti diketahui, dalam zaman VOC, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan. Mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya itulah maksud dan tujuan dari pada segala usaha dalam segala lapangan. Pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada intruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pelajaran membaca, menulis dan berhitung akan tetapi hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri. Selanjutnya tentang usaha pendidikan dan pengajaran dalam zaman Jepang usaha kita memerlukan uraian yang panjang lebar. Cukuplah diketahui, bahwa zaman Jepang bolehlah dianggap sebagai penjelmaan jiwa penjajah secara mentah-mentah. Hasrat yang mengeksploitasikan bangsa dan negara kita berdasarkan imperialisme dan kapitalisme, di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan. Pendek kata di lapangan hidup dan penghidupan seutuhnya, tampak dalam segala gerak gerik bangsa Jepang, mulai mereka mendarat pada tahun 1942 sampai mereka mengalami kekalahan yang hebat pada tahun 1945. Sikap dan tindakan bangsa Jepang selama mereka menduduki negeri kita selalu bersifat bengis dan zalim, pula menunjukkan sifat jiwa penjajah secara mentah-mentah. Sekolah-sekolah partikular semua ditutup. Kaum terpelajar banyak yang disiksa, bahkan dibunuh secara besar-besaran di Borneo. Tampak maksud dan tujuannya untuk menguasai Indonesia zonder bangsa Indonesia. Lihat Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta : Taman Siswa, 1962), 194 dan 196-197.

- 3) Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan bangsa, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing, yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia
- 4) Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan/atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikuler, yang penyelenggaraannya sebagian atau sepenuhnya boleh dibiayai oleh pemerintah.
- 5) Tentang susunan pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum harus ditetapkan suatu daftar pelajaran sedikit-dikitnya yang menetapkan luas tingginya pelajaran pengetahuan dan kepandaian umum, serta pula pendidikan budi pekerti, teristimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, cinta tanah air, serta keprajuritan. Syarat-syarat itu diwajibkan untuk semua sekolah, baik kepunyaan negeri maupun partikuler.
- 6) Tentang pelajaran bahasa dan kebudayaan, maka dengan mengingat Pasal 32 dan 36 UUD dan Pasal 3 dalam Garis-garis Besar adalah sebagai berikut :
  - a) Bahasa Indonesia diajarkan dengan cukup disegala sekolah di seluruh Indonesia dan dipakai sebagai “bahasa pengantar” mulai di sekolah-sekolah rakyat sampai di sekolah-sekolah tinggi.
  - b) Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan sebaik-baiknya, diwajibkan mengadakan “bahasa persatuan : mulai kelas 3 pada sekolah pertama, dengan jaminan akan cukup pandai anak-anak dalam bahasa Indonesia bila mereka tamat belajar di sekolah-sekolah rakyat.
  - c) Di sekolah-sekolah menengah tinggi bagian Budaya diajarkan bahasa Arab dan Sanskerta.

- d) Bahasa-bahasa asing yang perlu untuk menuntut pelajaran penting, baik yang terdapat dalam kitab-kitab yang berbahasa asing maupun yang harus didapat dengan melalui sekolah-sekolah di luar negeri, dipelajarkan di sekolah-sekolah menengah atau menengah tinggi
- e) Selain itu, di dalam sekolah-sekolah harus dipentingkan juga pendidikan rakyat dengan jalan sebagai berikut : (1) latihan keprajuritan untuk pemuda-pemuda dan pemudi, (2) pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang desa, (3) pendidikan khusus kepada kaum ibu, (4) memperbanyak bacaan dengan memajukan perpustakaan, penerbitan surat-surat kabar dan majalah-majalah, (5) mendirikan balai bahasa Indonesia, dan (6) mengirimkan pelajar-pelajar ke seluruh dunia.<sup>9</sup>

#### 4) Pendidikan Islam berbasis pada Konsep Multikultural

Untuk mengkontekstualisasikan pendidikan Islam harus menilik pada konsep pendidikan multikultural. Di mana pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Secara operasional, pendidikan multikultural pada dasarnya adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi anak didik (*multiple learning environments*) dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik (Amini, 2005).

Anderson dan Cushner (dalam Hasan: 2001) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan keragaman kebudayaan. Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas, meski posisi kebudayaan masih sama yakni mencakup keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai objek studi.

Dengan kata lain keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum.

---

<sup>9</sup> Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta : Taman Siswa, 1962), 194 dan 200.

Definisi lain yang relevan untuk dikutip di sini adalah pendapat James A. Bank. Menurutnya, pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek: konsep, gerakan, dan proses (James A. Bank, 1989: 2-3). Dari aspek konsepnya, pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender dan kelas sosial mereka, etnik mereka, ras mereka, dan atau karakteristik-karakteristik kultural lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas.

Dari aspek gerakannya, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tetapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pembelajaran, dan lingkungan sekolah.

Dari aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan, seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai, karena itu proses ini harus berlangsung terus-menerus.

Dalam pendidikan multikultural, ada dimensi-dimensi yang harus diperhatikan. Menurut James Blank ada lima dimensi pendidikan multikultural yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran;
2. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran;
3. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik;
4. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajarannya;
5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik.

Untuk memberikan pendidikan multikultural, sekolah atau guru perlu menelaah secara kritis tentang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi berbagai macam bias. Dalam kaitan ini, Sadker sebagaimana dikutip Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn (1983: 299-300) mencatat adanya 6 (enam) macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran.

Keenam macam bias tersebut adalah: (a) bias yang tidak kelihatan (*invisibility*), (b) pemberian label (*stereotyping*), (c) selektivitas dan ketidakseimbangan (*selectivity and imbalance*), (d) tidak mengacu realitas (*unreality*), (e) pembagian dan isolasi (*fragmentation and isolation*), dan (f) bahasa (*language*).

Buku-buku teks yang dipakai guru dalam proses pembelajaran, umumnya, menekankan pembahasannya pada budaya-budaya mayoritas, sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan. Inilah yang disebut dengan bias tidak kelihatan (*invisibility*). Bias lain yang terdapat dalam buku-buku teks selama ini adalah adanya pemberian label kepada kelompok lain, baik positif atau negatif. Bias ini namanya *stereotyping*. Misalnya, orang Madura itu ulet dan orang Jawa itu pemalas.

Selain itu, buku-buku teks yang dijadikan pegangan guru biasanya menggunakan perspektif budaya mayoritas dan abai terhadap perspektif budaya minoritas. Inilah yang disebut bias *selectivity and imbalance*. Misalnya, buku teks fiqh yang digunakan di sekolah NU, perspektif yang dipilih adalah perspektif yang sejalan dengan paham organisasi, sementara perspektif lain diabaikan. Bias lain yang terdapat dalam buku teks adalah *unreality*.

Maksudnya, buku teks yang dijadikan pegangan guru tidak mengacu kepada data yang riil. Misalnya, buku teks Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru banyak yang menginformasikan peristiwa dengan pelaku yang tidak sebenarnya. Secara teknis, ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural.

*Pertama*, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal.

Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

*Kedua*, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan.

Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

*Keempat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. *Kelima*, kemungkinan bahwa pendidikan, baik dalam maupun luar sekolah, meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep *dwi budaya* atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi.

Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

#### **5) Pendidikan Islam berbasis kemasyarakatan**

Pendidikan berbasis kemasyarakatan dapat diuraikan sebagai kegiatan pendidikan yang memberikan keluasan kepada masyarakat untuk ikut serta memberikan peran dan partisipasinya dalam kegiatan pendidikan. Berbagai kegiatan dan komponen pendidikan, mulai dari perumusan visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar-mengajar, pengadaan sarana prasarana dan lain sebagainya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dengan latar belakang budaya, agama, etnisitas, dan lain sebagainya.

Dengan cara demikian, pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan benar-benar dapat mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Pendidikan dengan berbasis pada masyarakat ini diperlukan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut :

- a) Sebagai reaksi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang menjadikan masyarakat hanya sebagai objek yang harus mengikuti sepenuhnya keinginan sebuah lembaga pendidikan. Melalui konsep pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, masyarakat dilibatkan dan diperhatikan harapan dan kebutuhannya dalam merancang pendidikan.
- b) Sebagai sebuah upaya, agar program pendidikan yang dilaksanakan dapat sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga lulusan pendidikan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

- c) Sebagai sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Dengan konsep pendidikan yang berbasis kemasyarakatan, dimungkinkan munculnya inisiatif, kreativitas, dan kemauan bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan cara mendarmabaktikan tenaga, pikiran, dan harta bendanya bagi kepentingan pendidikan. Masyarakat dapat terlibat dalam mengadakan lahan, bangunan gedung sekolah, peralatan belajar-mengajar, guru, pembiayaan dan lainnya. Dengan konsep ini, pendidikan yang berkembang di masyarakat akan memiliki dinamika dan warnanya yang amat beragam, sesuai dengan dinamika dan keragaman yang ada di masyarakat.

#### **6) Pendidikan Islam dalam Atmosfir Akademik**

Atmosfir akademik adalah salah satu faktor yang sangat diperlukan bagi terciptanya suasana yang kondusif bagi kegiatan belajar-mengajar. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), memasukkan atmosfir akademik sebagai salah satu komponen penilaian. Isi dari atmosfir akademik antara lain suasana yang sengaja dibangun dan diciptakan oleh sebuah lembaga pendidikan agar tercipta suasana pembelajaran yang kondusif.

Isi dari atmosfir akademik tersebut misalnya berkitan dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, workshof, pelatihan, penelitian, perlombaan, penulisan karya ilmiah, penyediaan perpustakaan dengan berbagai programnya yang menarik, pemberian bimbingan, bantuan dan lainnya oleh dosen pembimbing kepada para mahasiswa, sebagai kegiatan praktikum, penyediaan jaringan internet untuk mendapatkan berbagai bahan yang diperlukan untuk kegiatan belajar-mengajar, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya.

Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut, maka suasana kampus atau lembaga pendidikan terasa sebagai keadaan yang memungkinkan para siswa atau mahasiswa untuk memiliki semangat untuk berprestasi. Suasana tersebut selanjutnya menjadi semacam kebudayaan (*cultural*) yang ada pada lembaga pendidikan tersebut dan membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya.

Budaya akademik tersebut selanjutnya ditungkan dalam visi, misi, tujuan, dan program kegiatan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Visi, misi, tujuan dan program tersebut kemudian disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademik, kemudian dipantau pelaksanaannya, dengan menjadikan pimpinan sebagai penggerak utamanya. Membangun budaya yang demikian itu menjadi penting bukan hanya pada lembaga pendidikan, melainkan pada berbagai usaha lainnya. Keadaan inilah yang selanjutnya membentuk apa yang disebut sebagai budaya perusahaan (*corporate culture*).

Membentuk budaya perusahaan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan membentuk bangunan fisik. Jika tersedia dana, maka pembangunan fisik dipastikan dapat dibangun dalam waktu dua tahun misalnya. Sementara itu, pembanguna *culture* yang sifatnya kualitatif tidak hanya memerlukan dana, melainkan juga memerlukan keteladanan, bimbingan, pembiasaan, dan pengawasan dari pimpinan dan didukung oleh seluruh sivitas akademika.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Djokosantoso Moeljono dan Steve Sudjatmiko, *Corporate Culture Challenge to Excellence* (Jakarta : Gramedia, 2007), 27-30.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut, artikel ini menyimpulkan beberapa hal antara lain :

- 1) Pendidikan Islam dalam konteks budaya adalah konsep dan praktik pendidikan yang menjadikan kebudayaan sebagai bahan yang diajarkan, juga sebagai faktor yang dapat digunakan dalam merancang dan melaksanakan konsep pendidikan
- 2) Pendidikan Islam dalam konteks budaya dapat diimplementasikan dalam visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar-mengajar, pengelolaan, atmosfer akademik dan pendidikan multikultural
- 3) Pendidikan Islam dalam konteks budaya amat sejalan dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik baik dari segi agama, budaya, bahasa, etnis, stratifikasi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya
- 4) Pendidikan Islam dalam konteks budaya telah mempengaruhi munculnya aliran filsafat esensialis dan perenialis dalam pendidikan. Yaitu sebuah aliran yang melihat bahwa di dalam masyarakat telah terdapat budaya yang dinilai unggul teruji, dan bertahan lama. Nilai-nilai budaya tersebut akan ditransformasikan kepada peserta didik melalui kegiatan pendidikan sehingga identitas suatu bangsa dan kelangsungan hidupnya dapat terjamin.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan : Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, cet.ke-1 (Yogyakarta : ar-Ruzz Media Group, 2007), 99-117.

## Daftar Pustaka

- Al-Nahlawi, ‘Abd al-Rahman, *Ushul at-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’*, Mesir : Dar al-Fikr, 1979.
- Ashraf, Syed Ali., *New Horizon in Muslim Education.*, London : The Islamic Academy, Cambridge and Hodder and Stoughton, 1984.
- Buchori., Mochtar, *Pendidikan Antisipatif*, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 2001.
- Departemen Agama RI, *Sylabus Fakultas Tarbiyah IAIN*, Jakarta : Proyek Binperta Depag RI, 1991.
- Dewantara., Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta : Taman Siswa, 1962.
- Enung K, et al, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan : Manusia, Filsafat dan Pendidikan*, cet.ke-1, Yogyakarta : ar-Ruzz Media Group, 2007.
- Koessoema A., Doni, *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di zaman Global*, cet. ke-1, Jakarta : Grasindo, 2007.
- Moeljono., Djokosantoso dan Sudjatmiko., Steve, *Corporate Culture Challenge to Excellence*, Jakarta : Gramedia, 2007.
- Nata., Abuddin, *Akhlaq/Tasawuf*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Pusat Studi Pengembangan Pesantren (PSPP), *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan : PP RI NO.55 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*, Jakarta : PSPP-LeKDIS, 2007.
- Rahman., Fazlur, *Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- Rozak., Abd., et al, *Kompilasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Pendidikan*, cet.ke-1, FITK PRES Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Shiddiqi., Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1987.
- Shihab., H.M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung : Mizan, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta : Mutiara, 1977.